

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Organisasi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) adalah salah satu kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pada bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kementerian ini memiliki peran penting dalam memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.1 Knowledge Management Cycle

Sumber: McEntyre (2013)

Sejarah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat ditelusuri hingga masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada saat itu, pemerintah Hindia Belanda membentuk sebuah badan yang disebut Departemen Waterstaat, yang memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan air dan kelola sungai. Kemudian, setelah Indonesia merdeka lembaga ini mengalami perubahan nama menjadi Departemen Pekerjaan Umum.

Selama perkembangannya, Departemen Pekerjaan Umum mengalami serangkaian perubahan dalam sejarahnya. Pada tahun 1978, Departemen Pekerjaan Umum mengubah namanya menjadi Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) dengan tujuan memperluas cakupan tugas dan fungsi dalam sektor energi listrik. Kemudian, pada tahun 1999, terjadi perubahan nama kembali menjadi Departemen Pekerjaan Umum. Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia mengalami restrukturisasi dalam struktur organisasi pemerintah yang mengakibatkan penggabungan Departemen Pekerjaan Umum dengan

Departemen Perumahan Rakyat. Hasil dari penggabungan ini adalah pembentukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang baru.

Akar istilah "Pekerjaan Umum" tertanam dalam bahasa Belanda, di mana "*Openbare Werken*" merujuk pada bidang ini. Pada era Hindia Belanda, istilah yang digunakan adalah "*Waterstaat Swerken*", yang menunjukkan fokus awal pada pembangunan infrastruktur air. Evolusi terminologi ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting Pekerjaan Umum dalam membangun dan memelihara infrastruktur di Indonesia. Dalam konteks Pekerjaan Umum berbagai wilayah pemerintahan militer Jepang, penting untuk memiliki organisasi yang mengikuti model yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan disesuaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Jepang.

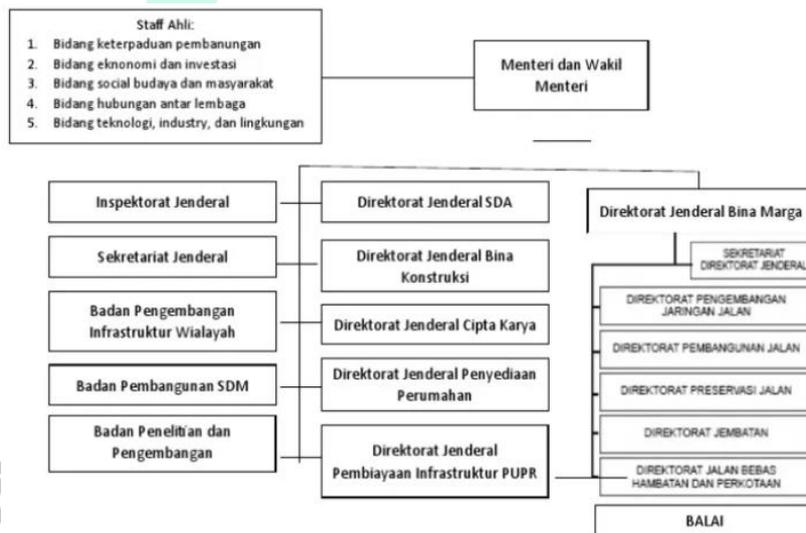
Setelah masa penjajahan oleh Jepang dan Belanda berakhir, generasi muda Indonesia mulai aktif berusaha merebut kendali pemerintahan dari tangan penjajah Jepang, baik di pusat pemerintahan Jakarta maupun di daerah-daerah. Pada tahun 1945, Kantor Pekerjaan Umum berlokasi di Bandung, khususnya di Gedung Sate, yang menjadi simbol perjuangan besar dengan banyak pengorbanan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada tanggal 3 Desember 1945, peristiwa penting ini dirayakan sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum sebagai penghormatan terhadap karyawan yang gugur dalam mempertahankan Gedung Sate.

Pemerintah Pusat Republik Indonesia, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, harus pindah dari Jakarta ke Purworejo dan kemudian ke Yogyakarta di tengah gejolak revolusi fisik. Perpindahan ini dilakukan untuk menjaga pemerintahan tetap berdiri dan mencegah gangguan dari Belanda. Pusat pemerintahan kembali ke Jakarta. Namun, Kementerian Pekerjaan Umum terus bergerak. Mengikuti perkembangan politik Indonesia, departemen ini telah mengalami berbagai perubahan kepemimpinan dan struktur sejak tahun 1945.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah hasil penggabungan dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, yang terjadi pada tahun 2015. Meskipun terjadi penggabungan, perubahan yang signifikan dalam tugas dan fungsi kementerian ini tidak begitu banyak terjadi. Kementerian ini tetap memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur, perumahan rakyat, dan pengembangan kawasan permukiman sebagai tugas utamanya. Bidang-bidang kerja yang menjadi

perhatian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat termasuk pembangunan jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, bandara, irigasi, perumahan, serta mitigasi bencana alam. Selain itu, kementerian ini juga berperan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait sektor PUPR, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan proyek-proyek infrastruktur. Seiring berjalannya waktu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia dan menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan. Kementerian ini memainkan peran sentral dalam memajukan sektor PUPR di Indonesia, dengan fokus pada penyediaan infrastruktur berkualitas tinggi dan perumahan yang layak bagi penduduk Indonesia.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Instansi Kementerian PUPR

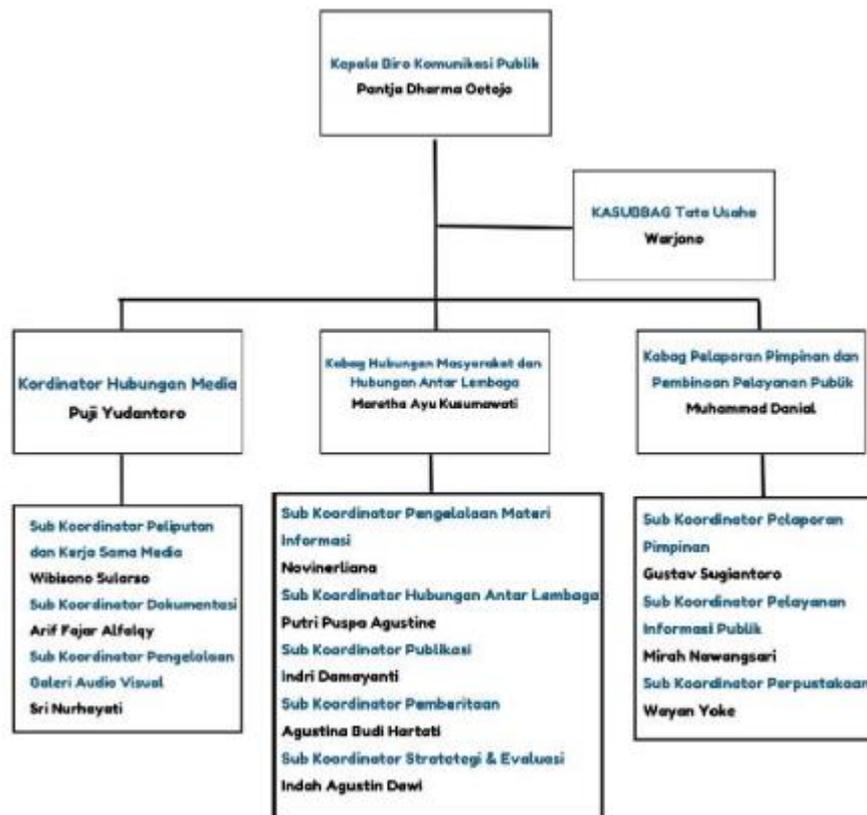
Sumber: <https://www.scribd.com/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan instansi Bergerak pada bidang pembangunan infrastruktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki beberapa bidang untuk membantu menjalankan dan merealisasikan program kerja instansi. Menteri Basuki Hadimoeljono memimpin Kementerian Pekerjaan Umum dan dibantu oleh Inspektorat Jendral, Sekretariat Jendral, dan jajaran lainnya untuk menaungi bidang-bidang yang terdapat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menjalani tugas dan program kerja.

Dibawah naungan Inspektorat Jendral terdapat bidang Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan, Bagian Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Bagian Hukum Kepatuhan Intern dan Komunikasi Publik, Bagian Kepegawaian dan Umum yang masing-masing dari bagian tersebut memiliki kelompok jabatan fungsionalnya sendiri. Inspektorat Jendral di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi lancar dan akuntabel secara keuangan. Salah satu tanggung jawab utama mereka adalah menjaga pengawasan internal melalui aktivitas seperti audit, evaluasi, dan pemantauan, antara lain. Hasil pengawasan ini kemudian dimasukkan ke dalam laporan, yang digunakan oleh Menteri PUPR sebagai bahan pertimbangan saat membuat keputusan.

Berikutnya terdapat Sekretariat Jendral yang menaungi Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Keuangan, Biro Umum, Biro Hukum, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Komunikasi Publik, Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah. Sekretariat Jendral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang berfungsi sebagai pusat kendali, mengemban tugas penting dalam mengatur berbagai aspek operasional seluruh organisasi di bawah naungannya. mulai dari memberikan dukungan administrasi yang menyeluruh hingga mengatur pelaksanaan tugas dan pembinaan. Tanggung jawabnya mencakup pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama antar instansi, pengelolaan arsip, hubungan masyarakat, dokumentasi operasi Kementerian, dan keterlibatan dalam penyusunan peraturan. Oleh karena itu, Sekretariat Jendral memainkan peran penting dalam menjamin bahwa seluruh bagian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berjalan dengan lancar dan efektif. Bagian dari Sekretariat Jendral juga menyelenggarakan fungsi sebagai penyelenggara pengeelolaan barang milik negara atau kekayaan negara serta memantau pengelolaan pengadaan barang atau jasa serta fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri.

2.1.1 Struktur Organisasi Biro Komunikasi Publik



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Biro Komunikasi Publik

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selalu memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan dan kinerja yang dilakukan oleh instansi. Sebagai humas, Biro Komunikasi Publik bertanggung jawab untuk menjaga reputasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan membantu dalam penyebaran informasi.

A. Kepala Biro Komunikasi

Dalam struktur organisasi kepengurusan Biro Komunikasi Publik, posisi Kepala Biro Komunikasi Publik adalah jabatan tertinggi menaungi Tim Humas. Kepala Biro Komunikasi Publik memiliki tanggung jawab atas seluruh publikasi yang diunggah oleh instansi dan seluruh program kerja yang dilakukan oleh sub bagian Biro Komunikasi Publik.

B. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan urusan dan pelaksanaan program-program yang terkait dengan administrasi, keuangan, urusan kepegawaian, dan pengelolaan barang milik negara.

C. Hubungan Media

Koordinator Hubungan Media memiliki tanggung jawab penuh atas 3 Sub Bagian sehingga seluruh kegiatan dan program kerja dari ketiga sub bagian tersebut harus dengan persetujuan dan arahan dari Koordinator, diantaranya adalah:

1. Sub Bagian Peliputan dan Kerja Sama Media memiliki tugas untuk peliputan, dan menyusun news release yang berisi tentang seluruh kegiatan internal dan eksternal, dan hasil kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Sub Bagian Dokumentasi bertugas untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan hasil kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan memelihara arsip dari gambar atau video yang diperoleh.
3. Sub Bagian Pengelolaan Galeri Audio Visual memiliki tugas melakukan pembuatan dan pengelolaan konten audio visual, serta meningkatkan sumber daya untuk pelayanan komunikasi dan informasi kepada publik dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

D. Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga

Umumnya, Kepala bagian ini memiliki tugas yang berkaitan dengan menjalani hubungan baik antar lembaga yang berkerja sama dengan instansi mengenai kehumasan. Kepala bagian ini melingkupi lima sub bagian, sehingga seluruh kegiatan dan program kerja dari kelima Sub Bagian tersebut harus dengan persetujuan dan arahan dari Kepala bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Pengelola Materi Informasi yang memiliki tugas untuk mengelola media sosial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan informasi mengenai kegiatan dan hasil kerja dari instansi.

- b. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga memiliki tugas memiliki peran strategis dalam membangun kemitraan dan kolaborasi yang bermanfaat bagi Kementerian PUPR. Melalui hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga lain, sub bagian ini dapat membantu mencapai tujuan dan meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan proyek-proyek dan program-program yang relevan dengan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- c. Sub Bagian Publikasi memiliki peran penting dalam menjalin hubungan yang baik dengan publik dan memastikan bahwa informasi tentang kegiatan dan proyek Kementerian PUPR disampaikan secara akurat dan efektif sehingga membantu dalam membangun pemahaman dan dukungan publik serta mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan pemerintah.
- d. Sub Bagian Pemberitaan bertugas untuk Memastikan semua informasi terkait kegiatan dan proyek PUPR disusun dengan baik dan akurat.
- e. Sub Bagian Strategi dan Evaluasi bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap program dan proyek yang telah dilaksanakan, termasuk pengukuran kinerja, dampak, dan keberhasilan proyek tersebut.

E. Pelaporan Pemimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik

- a. Sub Bagian Pelaporan Pimpinan memiliki tugas menyusun, mengumpulkan, dan menyajikan materi pidato pimpinan. Selain itu bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan berdasarkan analisis data dan informasi yang disajikan dalam laporan.
- b. Sub Bagian Pelayanan Informasi Publik memiliki peran sebagai mengkoordinasikan konsultasi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program atau kebijakan Kementerian PUPR.
- c. Sub Bagian Perpustakaan memiliki tanggung jawab untuk merencanakan mengumpulkan, mengelola, dan memelihara koleksi berbagai jenis materi seperti buku, jurnal, laporan, dokumen, dan sumber daya elektronik yang relevan dengan bidang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.3 Kegiatan Umum Organisasi

Melalui berbagai tugas dan fungsinya di bidang infrastruktur dan perumahan rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan penting dalam mendukung roda pemerintahan negara. Berbagai tugas dan fungsi ini menunjukkan komitmen PUPR untuk membangun infrastruktur dan perumahan rakyat yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan untuk mendukung kemajuan negara dan masyarakatnya, yaitu sebagai berikut.

1. Memastikan kelancaran dan keseimbangan dalam berbagai aspek, kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, jalan, sistem air minum, limbah domestik, saluran air, sampah, perencanaan bangunan, permukiman, infrastruktur strategis, perumahan, pembiayaan proyek umum, dan pembinaan industri konstruksi harus disusun dan diterapkan dengan baik.
2. Pengkoordinasian eksekusi tugas, pendampingan, dan penyediaan dukungan administratif kepada semua komponen organisasi di dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Tanggung jawab yang mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, hingga pemanfaatan aset negara dengan cara yang paling efisien dan optimal agar dapat mendorong kesejahteraan.
4. Kontrol atas operasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Memberi bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di wilayah tersebut mulai dari teknis maupun rencana yang merata dalam membangun sarana prasana penunjang wilayah.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang infrastruktur dan perumahan menjadi fokus utama, dengan memberikan dukungan substantif kepada seluruh elemen organisasi di Kementerian PUPR. Selain itu, siap sedia untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Presiden.
- 7.